

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba adalah laporan laba rugi (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Kasmir (2010), laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui, perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Walaupun seluruh informasi yang tercantum dalam laporan keuangan penting bagi pengguna, tetapi pada umumnya perhatian pengguna laporan keuangan tertuju pada informasi laba. Hal tersebut dikarenakan laba merupakan salah satu bagian yang menjadi parameter guna mengukur kenaikan atau penurunan kinerja pada perusahaan. Laba yang lebih tinggi dari periode sebelumnya dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mempengaruhi peningkatan harga saham perusahaan (Sudiani, 2016). Kemahiran dan pengetahuan manajer dalam bisnis berfungsi sebagai kunci bahwa laporan keuangan yang disajikan handal dan akan membantu para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan (Banderlipe II, 2009).

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba merupakan tindakan manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui

stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Tujuannya adalah memanipulasi besaran laba yang dilaporkan atau kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan dengan kata lain untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy, 1998). Manajemen laba dikatakan sebagai “*Some Ability to Increase or Decrease Reported Net Income At Will*”, ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba termasuk perataan laba, sesuai dengan keinginan manajer tersebut (Copeland, 1968). Praktik manajemen laba merupakan tindakan oportunistik manajemen yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan pada teori agensi yang menyatakan bahwa adanya pemisahan kepentingan antara pemilik atau pemegang saham perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan atau manajemen (agen) dapat mengakibatkan masalah keagenan atau *agency problem*. Pemilik perusahaan menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi kesejahteraan prinsipal, tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan utilitasnya sendiri dan menyalah gunakan kepercayaan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Ellen, 2013).

Menurut U-Thai (2001), praktik manajemen laba di Indonesia rata-rata masih tinggi, dengan tingkat proteksi investor di Indonesia dinilai relatif rendah. Luez *et al.* (2002) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia termasuk peringkat ke-12 dalam melakukan praktik manajemen laba dari 31 negara yang diteliti. Kasus manajemen laba terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Laporan keuangan Bank Bukopin ini

diaudit oleh auditor yang terafiliasi dengan salah satu big four auditor international Ernest & Young, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang tercatat di BEI telah ditemukan fenomena manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Bank Bukopin Tbk. Manajemen secara terang-terangan merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017 hal tersebut. Terlihat bahwa pada tahun 2015-2016 (sebelum revisi), laba bersih Bank Bukopin sebesar Rp 1,08 triliun, setelah melakukan revisi pada tahun 2016-2017 laba bersih Bank Bukopin mengalami penurunan menjadi Rp 183,56 miliar. Sedangkan untuk pendapatan yang didapat dari pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit mengalami penurunan menjadi Rp 317,88 miliar dari sebelumnya Rp 1,06 triliun (Detik, 2018).

Kasus manajemen laba yang terjadi di Bank Bukopin memberikan bukti bahwa praktik manajemen laba ternyata masih dilakukan dalam perusahaan perbankan, walaupun regulasinya lebih ketat dibandingkan jenis perusahaan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat di minimalisir melalui tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Demi kepentingan pemegang saham pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa manajemen bekerja secara sungguh-sungguh. Penerapan *good corporate governance* (GCG) bertujuan menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Mekanisme *Good*

corporate governance dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mekanisme eksternal seperti konsentrasi kepemilikan saham dan mekanisme internal melalui keberadaan dewan komisaris (Barnhart, et al, 1998)

Menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan, pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Apabila konsentrasi kepemilikan dapat diwujudkan, tindakan manajemen laba dapat diminimalkan (Yustiana, 2014). Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan insitusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Dewi, 2005). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Nugroho (2020) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Perdana (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tingginya kepemilikan saham dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan laba mempunyai kekuatan responsif yang dapat memberikan informasi yang positif bagi pihak – pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham mayoritas dan pelaku pasar modal pada umumnya.

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris (Pracihara, 2016). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Siallagan (2006), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Seorang manajer yang mempunyai saham dan kepentingan pribadi, yaitu adanya return yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam hal menaikkan laba maupun menurunkan laba demi kepentingan tersebut (Utari, 2016). Puspitasari (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. Kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu menciptakan kinerja perusahaan secara optimal. Sedangkan penelitian Wirayana & Sudana (2018) dan Kusumawardana & Haryanto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Komisaris adalah sekelompok orang pegawai, petugas, pemegang saham utama yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6, dewan komisaris adalah organ perseroan

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1 poin e, syarat untuk diangkatnya dewan komisaris salah satunya adalah memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik. Kemampuan dewan komisaris untuk mendeteksi adanya masalah secara lebih dini akan jauh lebih efektif apabila dewan komisaris memiliki keahlian dalam bidang terkait dengan masalah tersebut. Kompetensi dewan komisaris merupakan faktor yang sangat penting, karena dewan komisaris yang memiliki pemahaman yang baik atas operasi bisnis dapat mereview laporan keuangan secara efektif (Lanfranconi dan Robertson, 2002).

Kompetensi dewan komisaris dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi dalam bidang pengalaman kerja perusahaan, kompetensi pada bidang akuntansi/keuangan dan kompetensi dalam tata kelola perusahaan (Yunos et al., 2010). Kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan adalah komisaris yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang baik, mengenai bidang pengalaman kerja perusahaan lebih dapat melakukan pengawasan secara efektif dalam hal pelaporan keuangan. Kompetensi dewan komisaris pada bidang akuntansi/keuangan adalah dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dapat dilihat dari pendidikannya atau gelar yang dimiliki oleh dewan komisaris. Kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan adalah dewan komisaris yang memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain, memungkinkan dewan komisaris memiliki banyak pengalaman dan

pengetahuan tentang tata kelola perusahaan, sehingga mampu mendeteksi terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajer (Ratnadi dan Ulupui, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirayana & Sudana (2018) dan Tirtayunita (2020) menunjukkan bahwa kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan berpengaruh negatif pada manajemen laba sedangkan penelitian oleh Nugroho dan Eko (2011) dan Xiong (2016) menyatakan bahwa lamanya seorang dewan komisaris bekerja pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Tirtayunita (2020) dan Dwiharyadi (2017) menunjukkan bahwa kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi berpengaruh negatif pada manajemen laba sedangkan penelitian Ningsih (2020) menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi berpengaruh positif pada manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Wirayana & Sudana (2018) yang mengemukakan bahwa keahlian dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan berpengaruh negatif pada manajemen laba sedangkan penelitian Andayani (2010) menyatakan bahwa keahlian dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan berpengaruh positif pada manajemen laba.

Adapun motivasi yang melatar belakangi penelitian ini adalah mengingat betapa pentingnya informasi laporan keuangan dalam perusahaan sehingga manajemen dituntut untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya dengan demikian dapat membantu pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak hanya diperuntukan

bagi pemilik perusahaan akan tetapi sangat berguna juga bagi para investor dalam menginvestasikan dananya. Dengan adanya tingkat laba yang stabil membuat investor lebih memiliki kepercayaan terhadap manajemen karena jika terjadi laba yang tidak menunjukkan hasil yang diinginkan pada laporan keuangan maka seorang manajer akan melakukan manajemen laba.

Motivasi lainnya dalam melakukan penelitian ini adalah karena merujuk pada hasil penelitian Luez,dk (2002) menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kluster negara – negara dalam perlindungan investor yang lemah, sehingga terjadi praktik manajemen laba yang tinggi contohnya terjadi khusus manajemen laba pada Bank Century (2008) dan Bank BRI (2011).

Penelitian ini juga untuk melakukan pengujian ulang terhadap perbedaan hasil dari beberapa penelitian mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi/keuangan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai 2020 sebagai objek penelitian. Perusahaan perbankan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Meningkatnya kinerja perusahaan perbankan di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dan semakin dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemajuan ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya peranan perbankan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian seperti berikut ini.

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada manajemen laba ?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada manajemen laba ?
- 3) Apakah kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan berpengaruh pada manajemen laba ?
- 4) Apakah kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi/keuangan berpengaruh pada manajemen laba ?
- 5) Apakah kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan berpengaruh pada manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional pada manajemen laba.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial pada manajemen laba.

- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan pada manajemen laba.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi/keuangan pada manajemen laba.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan pada manajemen laba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pemikiran dalam memperluas kajian aspek teori keagenan berupa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompetensi dewan komisaris dan manajemen laba pada perusahaan perbankan.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi praktis bagi pembaca yang ingin berinvestasi di bursa efek Indonesia agar dapat memberikan wawasan untuk mengantisipasi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen dan dapat sebagai informasi dalam memutuskan investasi atas pemilihan perusahaan dalam menanamkan modalnya khususnya bagi peneliti selanjutnya, perusahaan, para investor dan pelaku pasar modal yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Jensen and Meckling, 1976). Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi kesejahteraan prinsipal, tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan utilitasnya sendiri dan menyalah gunakan kepercayaan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).

Dalam teori ini seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan mengetahui seluruh informasi internal dan prospek kedepan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Para manajer sebagai pengelola wajib memberikan seluruh informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham, namun terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam perusahaan. Teori keagenan diperkuat juga dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) adalah merupakan sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk *steakholder* (Sutedi, 2011). Penerapan prinsip GCG ini untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mekanisme eksternal seperti konsentrasi kepemilikan saham dan mekanisme internal melalui keberadaan dewan komisaris (Barnhart,et al, 1998).

Dalam perusahaan, mengenai masalah keagenan yang sering dihadapi oleh investor ini mengacu kepada sulitnya investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2013). Pemilik perusahaan harus mengeluarkan biaya keagenan (*agency cost*) untuk menyakinkan bahwa manajemen bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan pemilik perusahaan dan meminimkan masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan biaya agensi dalam tiga jenis:

1. Biaya monitoring (*monitoring cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi tindakan dan keputusan manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.
2. Biaya bonding (*bonding cost*) yaitu tindakan untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal, atau untuk meyakinkan bahwa principal akan memberikan kompensasi jika agen benar – benar melakukan tindakan yang tepat.

3. Kerugian residual (*residual lost*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurang kemakmuran yang dialami dalam oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

Penelitian ini mengadopsi teori keagenan untuk menjelaskan masalah keagenan (*agency problem*) antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Manajemen dapat berperilaku oportunistik dengan mementingkan diri sendiri melalui praktik manajemen laba. Salah satu cara untuk meminimumkan manajemen laba dengan melakukan *monitoring* terhadap manajemen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, mekanisme eksternal seperti konsentrasi kepemilikan saham dan mekanisme internal melalui keberadaan dewan komisaris (Barnhart, et al, 1998). Dengan konsentrasi kepemilikan saham diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Sudana, 2011) dan Kompetensi dewan komisaris dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi dalam bidang pengalaman kerja perusahaan, kompetensi pada bidang akuntansi/keuangan dan kompetensi dalam tata kelola perusahaan (Yunos et al., 2010).

2.1.2 Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba merupakan tindakan manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba terjadi ketika para eksekutif mengatur pelaporan keuangan dengan menstruktur transaksi sehingga mengubah

permukaan laporan keuangan. Tujuannya adalah memanipulasi besaran laba yang dilaporkan atau kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy, 1998).

Menurut Scott (2000), membedakan manajemen laba menjadi dua. Pertama, manajemen laba dilihat dari perilaku oportunistik manajer dalam memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost sehingga tindakan manajer tersebut bisa dikatakan sebagai *moral hazard* karena efeknya akan memberikan keuntungan bagi dirinya saja dan dapat merugikan pihak lain. Kedua, melihat manajemen laba dari *perspektif efficient contracting*, dimana manajer memiliki fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi ketidakpastian yang bisa saja terjadi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dikatakan fleksibel karena manajer memiliki wewenang dalam memilih metode akuntansi yang akan digunakan yang diizinkan oleh standar. Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

1) *Bonus Purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

2) *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3) *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan jumlah pajak pendapatan yang harus dibayarkan.

4) Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5) *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6) Pentingnya Memberi Informasi kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik

Menurut Scott (2000), terdapat empat pola atau aktivitas dalam melakukan manajemen laba yaitu:

a) *Taking a bath*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara melaporkan rugi yang besar sekaligus jika perusahaan mengalami kerugian sehingga dapat menciptakan peluang laba yang besar di masa yang akan datang. Pola ini dapat dijelaskan dalam penelitian mengenai bonus plan hypothesis, dimana manajemen akan meminimalkan laba karena kondisi perusahaan saat ini rugi.

b) *Income minimization*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income minimization* dilakukan pada saat tingkat profitabilitas perusahaan cukup tinggi. Contoh penerapan pola ini adalah pada saat perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari *political cost*.

c) *Income maximization*

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. *Income maximization* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, serta untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain.

d) Income smoothing.

Pola ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat laba yang stabil dan mengurangi fluktuasi naik turunnya laba sehingga perusahaan terlihat stabil. Dalam hal ini laba akan diturunkan jika terjadi peningkatan yang tajam dan menaikkan laba jika tingkat laba yang diperoleh berada dibawah tingkat laba yang ditentukan. Tingkat laba yang stabil membuat pemilik dan kreditor lebih memiliki kepercayaan terhadap manajemen.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Jensen and Meckling, 1976). Teori keagenan diperkuat dengan adanya teori kepemilikan adalah pengawasan dan control melalui konsentrasi kepemilikan dinilai paling baik untuk mengendalikan sifat oportunisme para pengelola perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan insitusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Dewi, 2005). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Permanasari, 2010). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham karena pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Azwar, 2011).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Pemegang saham mayoritas bisa menjadi bagian dari manajemen atau paling tidak menunjukan manajer pilihannya, agar dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas (Wiryadi, 2013). Manajemen laba terjadinya karena adanya persoalan teori keagenan sebagai akibat dari pemisah kepemilikan dengan manajemen perusahaan, problem tersebut dapat dipengaruhi oleh stuktur kepemilikan yaitu stuktur kepemilikan manajerial dan stuktur kepemilikan institusional.

Kepemilikan saham yang lebih terkonsentrasi kepada institusi akan membuat institusi tersebut menjadi pemegang saham mayoritas sehingga memiliki hak kontrol dan hak aliran kas. Hak kontrol ini membuat pemegang saham institusi mampu mengontrol serta mengawasi tindakan manajemen dan hak aliran kas membuat institusi menginginkan manajer menjalankan perusahaan secara benar. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Utari, 2016).

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen)) (Jensen and Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang

diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Permanasari, 2010). Pracihara (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris (Pracihara, 2016). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Siallagan (2006), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistik manajer yang meningkat. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Seorang manajer yang mempunyai saham dan kepentingan pribadi, yaitu adanya return yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam hal menaikkan laba maupun menurunkan laba demi kepentingan tersebut (Utari, 2016). Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria, yaitu kriteria pertama, perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer dan pemilik (*owner manager*), kriteria kedua perusahaan yang dipimpin oleh dan non pemilik (*nonowner manager*). Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Kusumawardhani, 2012).

2.1.5 Kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan

Kompetensi dewan komisaris dalam bidang pengalaman kerja perusahaan adalah komisaris yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang pengalaman kerja perusahaan lebih dapat melakukan pengawasan secara efektif dalam hal pelaporan keuangan. Komisaris dapat mewakili kepentingan para pemegang saham dan terkadang

memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja perusahaan mengingat fungsi dewan komisaris adalah bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemegang saham. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 pasal 4 ayat 1 poin e, syarat untuk diangkatnya dewan komisaris salah satunya adalah memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik. Kemampuan dewan komisaris untuk mendeteksi adanya masalah secara lebih dini akan jauh lebih efektif apabila dewan komisaris memiliki keahlian dalam bidang terkait dengan masalah tersebut. Perusahaan dapat mempertimbangkan kompetensi atau pengetahuan dewan komisaris untuk meminimalkan manajemen laba. Keberadaan dewan komisaris bisa saja menjadi tidak efektif bagi perusahaan jika dewan komisaris tersebut tidak memiliki independensi atau tidak memiliki pengetahuan spesifik tentang perusahaan (Rindova, 1999). Komisaris yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang baik

mengenai bidang pengalaman kerja perusahaan lebih dapat melakukan pengawasan secara efektif dalam hal pelaporan keuangan. Kompetensi dalam bidang pengalaman kerja perusahaan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh dewan komisaris atas perusahaan karena lamanya mereka bekerja di perusahaan tersebut

Kompetensi dewan komisaris dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi dalam bidang pengalaman kerja perusahaan, kompetensi pada bidang akuntansi dan kompetensi dalam tata kelola persahaan (Yunos et al., 2010). Seorang komisaris dapat memiliki kompetensi atau keahlian dibidang perusahaan yang digeluti, dilihat dari pengalaman atau lamanya bekerja dalam perusahaan (Andriani dkk., 2007). Komisaris yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang perusahaannya dapat melakukan pengawasan lebih efektif dalam hal pelaporan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa lamanya seorang dewan komisaris bekerja pada perusahaan mengurangi *earnings management* (Bedard et al., 2004; Peasnell et al., 2005).

2.1.6 Kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi/keuangan

Kompetensi dewan komisaris pada bidang akuntansi adalah dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dapat dilihat dari pendidikannya atau gelar yang dimiliki oleh dewan komisaris. Dewan komisaris yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi mampu lebih baik dalam mengawasi kinerja manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan (Lanfranconi dan Robertson, 2002). Fungsi dewan komisaris sebagai pengawas dan penasihat namun tidak bertindak sebagai

pengambilan keputusan operasional karena tugas pengambilan keputusan operasional menjadi tanggung jawab direksi. Dewan komisaris diharapkan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan agar efektivitas fungsi pengawasan dapat ditingkatkan (Prastiti, 2013). Dewan komisaris memiliki peran agar sebuah laporan keuangan yaitu *timeliness* dapat terwujud dengan turut serta dalam perencanaan laporan keuangan, memonitoring dan evaluasi kinerja direksi serta ikut ambil alih dalam pemilihan auditor. Semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis maka semakin cepat pula suatu laporan keuangan tahunan dipublikasi begitu juga sebaliknya. Apabila dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya secara efektif maka dapat menemukan indikasi-indikasi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Tujuan utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan (*supervising*) dan memberi nasihat (*advising*) kepada eksekutif perusahaan (Machfoedz, 2006). Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi ini merupakan upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dengan melakukan pertemuan secara rutin dengan staf akuntansi dan auditor eksternal untuk mereview laporan keuangan, prosedur audit, dan mekanisme pengendalian internal sehingga proses penyajian laporan keuangan yang relevan dan *reliable* (Machfoedz, 2006).

Kompetensi di bidang akuntansi/ keuangan merujuk pada pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh dewan komisaris yang memungkinkan mereka untuk memahami proses dalam penyajian laporan keuangan, dan dapat membuat keputusan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Cadbury (1992) menyatakan bahwa faktor pengalaman penting sebagai unsur kompetensi bagi dewan komisaris. Pengalaman dan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi dan bisnis yang dimiliki dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat terhindar dari kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komisaris dapat mewakili kepentingan para pemegang saham dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja keuangan mengingat fungsi dewan komisaris adalah bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu keahlian dewan komisaris dalam bidang akuntansi dapat meningkatkan kejelasan informasi yang dapat dipercaya kepada pemegang saham bahwa laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan meminimalisir tindakan manajemen laba.

2.1.7 Kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi

perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Kompetensi dalam bidang tata kelola merupakan pengalaman dewan komisaris dalam mengelola perusahaan dilihat dari jabatan dewan komisaris pada perusahaan lain, sehingga semakin memperdalam pengetahuan mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan adalah Dewan komisaris yang memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain, memungkinkan dewan komisaris memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang tata kelola perusahaan, sehingga mampu mendeteksi terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajer (Ratnadi dan Ulupui, 2016). menurut Ferrer dan Banderlippe II (2012) seorang anggota dewan komisaris yang merangkap fungsi sebagai Direktur Utama di perusahaan lain dipandang sebagai menguntungkan karena menularkan pengelolaan perusahaan yang baik di perusahaan lain ke perusahaan dimana dia menjadi anggota Dewan Komisaris.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan,

daripada kehadiran komite audit. Penelitian Saleh *et al.* (2005) menyatakan bahwa dewan komisaris yang memiliki jabatan rangkap akan mengurangi *earnings managemen*, dewan komisaris yang memiliki rangkap jabatan dapat menurunkan praktik manajemen laba karena memiliki pengalaman tentang tata kelola perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan tentang publikasi penelitian mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kompetensi dewan komisaris pada manajemen laba.

Dwiharyadi (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu komite audit yang memiliki keahlian akuntansi, komite audit yang memiliki keahlian keuangan, dewan komisaris yang memiliki keahlian akuntansi dan dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian akuntansi, komite audit yang memiliki keahlian keuangan, dewan komisaris yang memiliki keahlian akuntansi dan dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Sari (2017) dalam penelitian yang berjudul “Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan

delapan variabel independen yaitu keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, keahlian dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan, komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, reputasi auditor, dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit, komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, keahlian dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan, *leverage*, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Perdana (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada perusahaan yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dari Tahun 2015-2017)”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kepemilikan institusional, leverage, dan komite audit dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Puspitasari (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Batu Bara”. Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu dewan komisaris independen, ukuran komite

audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan free cash flow dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *free cash flow* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Giovani (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan delapan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Fatma (2019) dalam penelitian yang berjudul “*The Influence of Family Control and Institutional Ownership of Profit Management*”. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pengendalian keluarga dan Kepemilikan Institusional dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian keluarga berpengaruh

positif terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Nugroho (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Tirtayunita (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi dan Kompetensi Dewan Komisaris pada Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ”. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi dewan komisaris dalam bidang spesifik perusahaan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisi yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi dewan komisaris dalam bidang spesifik perusahaan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Yoviani (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Profabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu *leverage*, profabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, profabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Felicya (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba”. Penelitian ini menggunakan delapan variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan, kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit dan variabel dependen yaitu manajemen laba. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, kualitas audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya terdapat pada populasi penelitian, yaitu perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan persamaan lainnya yaitu variabel independen yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompetensi dewan komisaris dalam

bidang pengalaman kerja perusahaan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang akuntansi/keuangan, kompetensi dewan komisaris dalam bidang tata kelola perusahaan dan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Sedangkan perbedaannya, selain menggunakan variabel tersebut penelitian sebelumnya ada yang menggunakan variabel *leverage*, komite audit, ukuran komite audit, audit eksternal, jumlah rapat komite audit, *free cash flow*, profitabilitas, pengendalian keluarga.

